

GAMBARAN KESESUAIAN OBAT DENGAN FORMULARIUM NASIONAL DI PUSKESMAS KOTA BARAT

Inka Friska Samuel¹, Madania², Faradila Ratu Cindana Mo'o³, Widy Susanti
Abdulkadir⁴, Faramita Hiola⁵

inka_d3farmasi@mahasiswa.ung.ac.id¹, madania.sripsi@gmail.com², faradilaratu@ung.ac.id³,
widi@ung.ac.id⁴, faramita@ung.ac.id⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berperan langsung terhadap keberhasilan terapi. Pengelolaan obat yang baik di fasilitas kesehatan harus mengacu pada daftar obat esensial nasional yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya adalah Formularium Nasional (Fornas). Formularium Nasional merupakan suatu daftar obat yang telah dipilih dan dianggap esensial, dan berfungsi sebagai acuan penulisan resep dalam pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara obat yang digunakan di fasilitas kesehatan dengan daftar Fornas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian obat di Puskesmas Kota Barat terhadap Formularium Nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif, berdasarkan data sekunder berupa daftar obat yang tersedia di Puskesmas Kota Barat tahun 2024. Data kemudian dibandingkan dengan daftar Formularium Nasional (Fornas) 2023 untuk menilai tingkat kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 156 item obat, sebanyak 134 item obat (85%) sesuai dengan Formularium Nasional, sedangkan 22 item obat (15%) tidak sesuai. Obat yang tidak tercantum dalam Fornas umumnya merupakan obat yang telah lama digunakan di Puskesmas dan terdapat dalam Formularium Puskesmas (Forpus), serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan klinis tertentu yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh Fornas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian obat di Puskesmas Kota Barat tergolong memadai, namun belum mencapai target ideal 100% sesuai kebijakan pelayanan kefarmasian nasional. Diperlukan peningkatan koordinasi antara tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan, optimalisasi peran Komite Farmasi dan Terapi (KFT), serta evaluasi berkala terhadap daftar obat agar implementasi Fornas dapat berjalan lebih optimal di tingkat pelayanan primer.

Kata Kunci: Formularium Nasional, Kesesuaian Obat, Puskesmas.

PENDAHULUAN

Obat memegang posisi krusial dalam mekanisme pengobatan dan berfungsi sebagai elemen utama yang memengaruhi efektivitas penyembuhan di berbagai institusi layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas. Ketersediaan obat di layanan kesehatan masyarakat harus dikelola secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Pengelolaan obat yang kurang efektif berpotensi menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam pasokan. Pada layanan kesehatan ketersediaan obat yang cukup dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat mengacu pada Formularium Nasional.

Menurut Indahri et al. (2014), Formularium Nasional (fornas) merupakan daftar obat-obatan yang dikembangkan dengan mengacu pada data ilmiah terkini oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional. Obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional dipilih karena efektivitasnya yang tinggi, keamanannya, serta biaya yang terjangkau, dan berfungsi sebagai panduan utama untuk penyusunan resep dalam sistem JKN.

Formularium Nasional (fornas) telah ditetapkan sebagai pedoman, namun penerapan dilapangan masih menghadapi beragam tantangan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Pada penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa

kepatuhan penggunaan atau peresepan obat terhadap Formularium Nasional belum mencapai tingkat optimal. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Trisna lestari & Yusi anggriani (2019), terdapat bahwa kesesuaian peresepan di beberapa Puskesmas hanya mencapai 85,3%, dan penelitian yang dilakukan oleh Imron et al. (2021) di Puskesmas Pesantren Kota Kediri menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 73,14%. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari segi medis maupun ekonomi, serta dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, memegang peranan penting dalam memastikan akses obat bagi masyarakat. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengevaluasi kesesuaian obat di Puskesmas dengan Formularium Nasional. Sebagai salah satu puskesmas yang terletak di ibu Kota Provinsi Gorontalo, puskesmas kota barat juga tidak terlepas dari masalah ketersediaan obat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya manusia, ketersediaan dan pengelolaan obat. Contohnya keterlambatan pengambilan atau pengiriman obat dari instalasi farmasi oleh puskesmas, serta terjadinya keterlambatan pengiriman obat oleh distributor dan kekosongan obat di distributor. Sehingga terpaksa puskesmas menggunakan obat yang tidak terdaftar dalam Formularium Nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Sesuaian Obat Dengan Formularium Nasional Di Puskesmas Kota Barat”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian secara cross sectional dan pengambilan data secara Retrospektif. Objek penelitian ini yaitu daftar obat dan penggunaan obat di puskesmas. Sedangkan subjek penelitian meliputi tenaga farmasi yang berperan langsung dalam pengelolaan obat di puskesmas, seperti apoteker.

Alat dan Bahan

Instrumen penelitian yang digunakan untuk evaluasi kesesuaian obat di puskesmas Kota Barat adalah laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Tahun 2024, daftar Formularium Nasional terbaru dan Lembar Observasi.

Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan daftar obat yang terdapat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Kota Barat tahun 2024. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional tahun 2023 untuk menilai tingkat kesesuaian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung persentase obat yang sesuai dan tidak sesuai menggunakan rumus: Persentase kesesuaian = (jumlah obat sesuai / total obat) x 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil perbandingan, diperoleh presentase jumlah obat yang sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Presentase Kesesuaian Obat Dengan Formularium Nasional

Kategori	Jumlah (item)	Presentase (%)
Sesuai	133	85%
Tidak Sesuai	23	15%
Total	156	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 156 item obat yang tersedia di Puskesmas Kota Barat, sebanyak 133 item obat (85%) sesuai dengan Formularium Nasional, sedangkan 23 item obat (15%) tidak sesuai yang berarti presentase ini belum memenuhi standar ideal yaitu 100%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dari daftar obat yang ada di Puskesmas Kota Barat, sebanyak 134 dari total 156 item obat yang termasuk dalam Formularium Nasional, dan 22 item obat yang tidak termasuk dalam Formularium Nasional. Tingkat kesesuaian obat dengan Formularium Nasional dihitung dengan membandingkan jumlah obat yang terdapat dalam Formularium Nasional terhadap total obat yang tersedia di puskesmas, kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus persen untuk memperoleh nilai persentase. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian obat di Puskesmas Kota Barat terhadap Formularium Nasional sebesar 85%.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Persentase kesesuaian obat yang ada di Puskesmas Kota Barat telah memenuhi standar kesesuaian di mana penggunaan obat sesuai dengan Formularium Nasional dianggap memadai apabila mencapai atau melebihi angka 80%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kawuluan et al., (2024) tentang Evaluasi Tingkat Ketersediaan Obat di Puskesmas Kombos Kecamatan Singkil Kota Manado, ditemukan bahwa Hasil persentase menunjukkan tingkat kesesuaian mencapai 89% yang dimana persentase ini telah memenuhi standar kesesuaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Adapun obat-obat di puskesmas kota barat yang tidak sesuai dengan daftar obat yang ada di formularium nasional meliputi Ambroxol tablet dan sirup, Gliseril Guaiakolat, Kloramfenikol salep kulit 2%, Meloxicam, Bromhexin, Curcumin syrup, Quantidex, Stimuno Forte, Enbatic Powder, Flunarizine, dan Renalyte Solutio, serta beberapa item lain seperti Dumin Rectal, Farbion, dan Gabiten. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dan pengelolaan obat.

Faktor sumber daya manusia, biasanya faktor ini adalah yang paling sering terjadi, seperti kurangnya pengetahuan atau pemahaman dokter terhadap obat yang terdaftar dalam Formularium Nasional terbaru. Kemudian kebiasaan persepean, adanya obat-obat yang memang sudah biasa digunakan oleh Puskesmas dalam pelayanan sehari-hari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rezeki et al., (2021), Obat-obat yang tidak termasuk Formularium Nasional tetap disediakan di Puskesmas karena obat tersebut sering diresepkan oleh dokter dan dibutuhkan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. Selain itu juga adanya kebutuhan klinis tertentu di lapangan yang tidak seluruhnya tercakup dalam Fornas, sehingga tenaga kesehatan menambahkan beberapa sediaan untuk menunjang pelayanan.

Faktor ketersediaan dan pengelolaan obat, ketersediaan obat yang tidak stabil dan pengelolaan obat yang tidak optimal juga menjadi faktor penting dalam ketidaksesuaian terhadap Formularium Nasional. Seperti kekosongan stok dalam penelitian yang dilakukan oleh Narulita & Aprianti (2020), menyatakan bahwa kekosongan stok sering terjadi akibat lemahnya perencanaan kebutuhan dan sistem distribusi, serta keterlambatan dalam pengadaan dari Instalasi Farmasi Kabupatrn/Kota. Kemudian masalah distrbusi dan keterbatasan anggaran juga biasanya mempengaruhi ketidaksesuaian obat denga formularium nasional seperti pada penelitian yang dilakukan oleh kawuluan et al., (2024) adapun kendala dalam melakukan pengadaan yaitu waktu lamanya pengiriman serta proses administrasi yang lama sehingga terjadi keterlambatan pengiriman yang mengakibatkan

waktu tunggu kedatangan obat yang lebih lama dan berdampak pada ketersediaan obat yang kosong di puskesmas belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan wawancara tambahan dengan apoteker yang ada di Puskesmas Kota Barat, obat-obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional sudah termasuk dalam Formularium Puskesmas yang disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) berdasarkan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerja dengan memperhatikan efektivitas serta keamanan obat dan faktor logistik di lapangan. Penggunaan obat yang tidak tercantum dalam Formularium hanya dapat dilakukan apabila terdapat indikasi medis yang jelas dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran, serta telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penggunaan obat sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Tahun 2023 Tentang Formularium Nasional dikatakan tujuan utama dari penyusunan dan pengaturan obat dalam Formularium Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengobatan, sehingga dapat mencapai penggunaan obat yang rasional. Apabila penggunaan obat di puskesmas tidak sesuai dengan daftar Fornas, maka tujuan dasar dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai secara menyeluruh. Ketidakesesuaian dalam penggunaan obat berisiko menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, mencakup gangguan pada efektivitas terapi dan peningkatan beban biaya pengobatan, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Narulita & Aprianti (2020), menunjukkan bahwa penggunaan obat yang tidak sesuai dengan formularium berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti terjadinya kekurangan bahkan kekosongan obat yang dapat mengganggu stabilitas persediaan, penurunan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan.

Penggunaan obat di luar Fornas tanpa dasar medis yang kuat dapat menimbulkan pemborosan anggaran karena obat yang digunakan mungkin memiliki harga lebih tinggi dan variasi obat yang lebih banyak. BPJS Kesehatan (2021), menegaskan bahwa obat yang tidak termasuk dalam Fornas tidak dijamin pembiayaannya oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, jika puskesmas menggunakan obat non-Fornas tanpa pertimbangan medis yang jelas, maka biaya pengadaan atau penggantian obat tersebut harus ditanggung oleh fasilitas kesehatan itu sendiri atau bahkan pasien.

Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, seluruh obat yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus sesuai dengan Formularium Nasional, sehingga standar ideal kesesuaian adalah 100%. Dengan demikian, meskipun tingkat kesesuaian 85% sudah tergolong baik dan menunjukkan komitmen Puskesmas Kota Barat dalam menerapkan kebijakan nasional, namun upaya menuju kesesuaian 100% tetap perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar sejalan dengan target ideal yang ditetapkan dalam kebijakan pelayanan kefarmasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesesuaian obat terhadap Formularium Nasional (Fornas) di Puskesmas Kota Barat, tingkat kesesuaian obat telah mencapai 85%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan obat di Puskesmas Kota Barat termasuk dalam kategori “sesuai”, karena telah memenuhi standar

minimal yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yaitu $\geq 80\%$.

DAFTAR PUSTAKA

- Indahri, Y., Rini Puji Lestari, T., Retnaningsih, H., Nul Hakim, L., & Rahmi Yuningsih, D. (2014). Studies In Bonda Aceh City, Aceh Province Ond Toyapura City, Popuo Province. *Kajian*, 19(3), 2. Www.Oontianakoost.Com/Feej/Oro,Karbar/Kavonr-Kesehatan
- Kawulusan, K. S. A. C., Citraningtyas, G., & Jayanto, I. (2024). Evaluasi Tingkat Ketersediaan Obat Di Puskesmas Kombos Kecamatan Singkil Kota Manado. *Jurnal Lentera Farma*, 3(1), 25–30. <https://doi.org/10.57207/Trny4174>
- Narulita, D., & Aprianti, F. (2020). Analisis Pengelolaan Obat Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 7(2), 97–104. <https://doi.org/10.20473/Jfiki.V7i2.2020>
- Permenkes. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 2017.
- Rezeki, A., Fhory, B. N., Yasa, M. S. R., Syahriah, S., & Wathan, N. (2021). Evaluasi Ketersediaan Obat Di Beberapa Puskesmas Wilayah Kabupaten X Tahun 2019. *Sasambo Journal Of Pharmacy*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.29303/Sjp.V2i2.120>
- Trisna Lestari, Yusi Anggriani, Dian Ratih Laksmiawati. (2019). Analisa Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Bpjs Kesehatan Dengan Formularium Nasional Di Puskesmas Kabupaten Tanggerang Tahun 2016. *Vi*(2), 56–65.